



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/11/2023
 Reviewed : 06/12/2023
 Accepted : 09/12/2023
 Published : 12/12/2023

Marthen Tabun¹

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG SD-SMP NEGERI SATU ATAP DAN APLIKASINYA DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KUPANG

Abstrak

Distribusi guru yang tidak merata terutama daerah terpencil, terpencar dan terisolir di Kabupaten Kupang dan kewenangan mengajar guru-guru SD-SMP Negeri Satu Atap 75% tidak memiliki kualifikasi S-1/DIV mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan di kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan guru, kualifikasi, kompetensi profesi guru SD-SMP Negeri Satu Atap serta respon masyarakat tentang kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang berjumlah 21 sekolah dan sampelnya adalah 5 sekolah. Hasil penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaksi Milles dan Huberman. Penelitian menemukan bahwa kuantitas guru SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang masih kurang dan proses distribusi guru tidak disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Kupang yang terpencil, terpencar dan terisolir. Kualifikasi guru SD-SMP Negeri Satu Kabupaten Kupang terdiri dari 25% guru berkualifikasi S-1, D-IV dan 75% berkualifikasi SMA, PGSLTP, PGSD, D-2 dan sederajat. Kompetensi profesi guru SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang dinilai kurang, dengan urutan yang paling rendah adalah kompetensi paedagogik dan kompetensi professional pada proses pembelajaran di kelas. Respons dari masyarakat tentang kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap pada dasarnya mendukung sikap pemerintah pusat dalam proses pelayanan pendidikan khusus Kabupaten Kupang. Disarankan guru dapat meningkatkan kompetensi profesi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti mengikuti seminar, workshop, MGMP Gugus dan MGMP Sekolah.

Kata Kunci: Kualifikasi Guru, Kompetensi Guru, Respon Masyarakat

Abstract

The unequal distribution of teachers, especially in remote, scattered, and isolated areas in Kupang Regency and the teaching authority of 75% of SD-SMP Negeri Satu Atap teachers do not have S-1/DIV qualifications resulting in low-quality education in Kupang district. This study aims to determine the condition of teachers, qualifications, and professional competence of SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency, and the community's response to the presence of SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency. This study used a descriptive qualitative method. The population of this study was all SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency totaling 21 schools and the sample was 5 schools. The research results were analyzed using the Milles and Huberman interaction analysis model. The study found that the quantity of SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency was still lacking and the teacher distribution process was not adapted to the geographical conditions of Kupang Regency which were remote, scattered, and isolated. Qualifications of SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency teachers consist of 25% of teachers with bachelor's degrees, D-IV qualifications, and 75% with SMA, PGSLTP, PGSD, D-2, and equivalent qualifications. The professional competence of teachers of SD - SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency is considered to be lacking, with the lowest order being pedagogic competence and professional competence in the learning process in the classroom.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
 email: administrasipublik@fisip.unand.ac.id

The response from the community regarding the presence of SD-SMP Negeri Satu Atap Kupang Regency supports the attitude of the central government in the process of providing special education services for Kupang Regency. It is recommended that teachers improve professional competence by utilizing existing facilities such as attending seminars, workshops, Group MGMPs, and School MGMPs.

Keywords: Teacher Qualifications, Teacher Competence, Community Response

PENDAHULUAN

Pendidikan bermutu adalah kerinduan dan harapan insan pencinta pendidikan, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh para ahli dan institusi pendidikan. mulai dari perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003), pengendalian mutu pendidikan melalui Badan Standar Nasional (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005), standar kelulusan melalui Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), peningkatan kualitas profesional guru dan peningkatan kesejahteraan guru (UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2005), dan otonomisasi pendidikan dan penerapan manajemen mutu berbasis sekolah.

Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia, secara fundamental telah ditetapkan oleh Founding Fathers menjadi amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan negara (Pembukaan UUD 1945 alinea IV). Kewajiban konstitusional ini, mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu juga mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% baik APBN maupun APBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 UUD 1945).

Komponen lain yang ikut menentukan pendidikan bermutu ialah manajerial pendidikan yang diartikan sebagai kemampuan mengelola secara cermat ketersediaan sumber daya manusia dan sarana material berdasarkan prinsip-prinsip manajemen diperlukan demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. Realitanya beragam masalah seperti kualitas pendidikan yang rendah, mutu lulusan yang dihasilkan sangat rendah, dibanding dengan negara-negara lain sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Berdasarkan laporan UNDP pada tahun 2005 ditemukan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 177 negara (M. Saiffudin, 2006). Hasil studi organisasi Internasional Educational Achievement (IEA) juga menemukan bahwa kemampuan membaca untuk tingkat SD berada pada urutan ke 38 dari 39 negara peserta studi, untuk tingkat SLTP berada pada urutan ke 38 dari 42 negara, dan untuk kemampuan IPA hanya berada pada urutan ke 40 dari 42 negara peserta. Rendahnya kualitas pendidikan tersebut merupakan akibat dari rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik (M. Saifuddin, 2006).

Penerapan UU No. 14 dan PP No. 11 Tahun 2005 untuk meningkatkan kualifikasi, profesionalisme dan memprofesikan guru masih sulit dilakukan di beberapa daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak keterbatasan baik keterbatasan anggaran, SDM, khususnya guru, sarana prasarana dan lain sebagainya. Persoalan mendasar di Kabupaten Kupang adalah kualifikasi guru yang harus S-1/D-IV, masalah kompetensi guru, dan kualitas serta kuantitas guru. Berdasarkan data profil pendidikan Kabupaten Kupang, guru-guru yang mengajar di SD-SMP Negeri Satu Atap hanya 30% yang layak mengajar (Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, 2005).

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan, serta rendahnya pemerataan pendidikan dan tenaga guru. Distribusi tenaga guru yang tidak merata di beberapa daerah terutama daerah terpencil, terpencar dan terisolir terkesan di lupakan oleh pengambil keputusan. Hal ini terbukti dengan masih terdapat kekurangan guru baik kualitas maupun kuantitas di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Kekurangan tenaga pengajar memungkinkan adanya guru yang merangkap mata pelajaran, rangkap sekolah (SD dan SMP) dalam tingkat dan jenjang berbeda.

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) dan Guru Rangkap Sekolah (GRS) yakni SD dan SMP, tidak hanya karena faktor kekurangan guru tetapi juga karena faktor letak geografis yang sulit di jangkau, ruang kelas terbatas, jumlah siswa yang relatif sedikit, guru tidak profesional,

guru tidak mampu mengkaji materi. Menurut Ginting (2005) kecenderungan merangkap sejumlah mata pelajaran pada seorang guru akan berpontesi menghambat kreatifitas guru yang bersangkutan. Jadwal materi yang padat mengakibatkan guru tidak lagi sempat membuat silabus, RPP, evaluasi dan penilaian (perangkat pembelajaran) dan suasana pembelajaran menjadi membosankan bagi peserta didik. Pembelajaran demikian disebut oleh Paulo Freire sebagai pendidikan dengan gaya bank, yakni guru memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswa hanya menerima, mencatat, menyimpan semua yang diberikan guru. Pendidikan model bank tersebut menurut Freire merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap siswa-siswa, karena menghambat kreativitas dan pengembangan potensi mereka (Freire, 2000).

Masalah guru rangkap sekolah (SD-SMP) dan rangkap mata pelajaran terdapat di seluruh jenjang sekolah SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Keterbatasan jumlah guru mengakibatkan guru SD terpaksa harus mengajar sebagai guru kelas di SD dan sebagai guru mata pelajaran di SMP Satu Atap. Masalah tersebut berdampak pada kualitas lulusan dan output atau Hasil Ujian Nasional. Terbukti dari rata-rata nilai UN di Kabupaten Kupang yang mendapat ranking urutan ke-18 dari 20 Kabupaten di NTT dan secara keseluruhan propinsi di Indonesia NTT hasil ujiannya mendapat ranking atau urutan ke-33 dari 33 propinsi di Indonesia (Data lulusan UN NTT 2007).

Persoalan mutu di Kabupaten Kupang merupakan persoalan lama yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena selama ini arah pembangunan di NTT difokuskan pada peningkatan infrastruktur, sedangkan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan masih sangat rendah. Padahal daerah ini yang memiliki jumlah penduduk 21.225 jiwa terdapat 21 SD-SMP Satu Atap dengan jumlah guru yang relatif kecil dan SDM yang sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan guru, kualifikasi, kompetensi profesi guru di SD-SMP Negeri Satu Atap serta respon masyarakat tentang kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang.

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena kegiatan pendidikan, pembelajaran dan beberapa hal yang penting seperti aktivitas, karakteristik tentang kewenangan mengajar guru SD-SMP Negeri Satu Atap, kualifikasi, kuantitas, kompetensi, profesional, dan situasi pembelajaran guru yang mengajar rangkap sekolah dan rangkap mata pelajaran di SD dan SMP Negeri Satu Atap. Penelitian ini dilakukan di lima SD-SMP Negeri Satu Atap yakni SD-SMP Negeri Satu Atap Tinis, SD-SMP Negeri Satu Atap Passi, SD-SMP Negeri Satu Atap Oemolo, SD-SMP Negeri Satu Atap Bonatama, dan SD-SMP Negeri Satu Atap Nekon, Kabupaten Kupang, yang berlangsung dari bulan Januari sampai April 2009. Populasi penelitian ini adalah seluruh SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang berjumlah 21 sekolah dan sampelnya adalah 5 sekolah yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaksi Milles dan Huberman yang meliputi tahap mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. Dari hasil ini dapat disimpulkan dan temuan sementara, kemudian diverifikasi dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Guru SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang

Jumlah SD - SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang adalah 21 sekolah yang distratifikasi ke dalam tiga lapisan yaitu lapisan atas yang digolongkan ke dalam sekolah terpencil sebanyak 5 sekolah (23,82%), lapisan menengah yang digolongkan ke dalam sekolah terpencar sebanyak 7 sekolah (33,33%), dan lapisan bawah yang digolongkan ke sekolah terisolir sebanyak 9 sekolah (42,85%). Berdasarkan tiga strata tersebut, ditetapkan 5 SD-SMP Negeri Satu Atap sebagai sampel penelitian yang terdiri dari strata satu sekolah terpencil yaitu SD-SMP Negeri Satu Atap Tinis dan SD-SMP Negeri Satu Atap Passi, strata dua sekolah terpencar yaitu SD-SMP Negeri Satu Atap Oemolo dan SD-SMP Negeri Satu Atap Bonatama, strata tiga sekolah terisolir yaitu SD-SMP Negeri Satu Atap Nekon.

Keadaan guru pada 5 SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten Kupang berdasarkan kuantitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kuantitas Guru pada 5 SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten Kupang Tahun 2009

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Strata			Jumlah Guru Yang Mengajar		Rata-Rata Guru Tiap Sekolah
			I	II	II I	SD-SMP	Rangkap SD-SMP	
1	SD-SMP Negeri Satu Atap Tinis	Amabi Oefeto Timur	√	-	-	11	1	
2	SD-SMP Negeri Satu Atap Passi	Fatuleu	√	-	-	12	3	
3	SD-SMP Negeri Satu Atap Bonatama	Fatuleu Barat	-	√	-	12	1	
4	SD-SMP Negeri Satu Atap Oemolo	Amabi Oefeto Timur	-	√	-	11	7	
5	SD-SMP Negeri Satu Atap Nekon	Fatuleu	-	-	√	13	4	
	Jumlah					54	16	
	Rata-Rata							3,21

Sumber: SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang (5 sekolah) Data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah guru tiap sekolah SD - SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang sangat kecil bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya sangat kurang 10 sampai 7 orang. Dengan menggunakan asumsi bahwa tiap sekolah membutuhkan guru sebanyak 13 orang sampai 25 guru dan jika disesuaikan dengan struktur kurikulum, maka tiap sekolah guru 5,4% atau 5-10 guru.

Kekurangan jumlah guru yang terjadi di SD - SMP Negeri Satu Atap mengakibatkan guru-guru SD yang berkualifikasi SPG, SGO, bahkan guru honor kualifikasi SMA direkrut untuk mengajar SMP Negeri Satu Atap. Temuan lainnya adalah masih banyak guru pada 5 SD-SMP Negeri yang merupakan sasaran penelitian belum memenuhi syarat, tetapi direkrut kepala sekolah untuk mengajar SD-SMP Negeri Satu Atap. Guru dengan kualifikasi tersebut, sebenarnya tidak memiliki kewenangan mengajar sesuai UU No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP' No 19 Tahun 2005. Kualifikasi guru yang rendah mengakibatkan mutu pendidikan dalam hal ini hasil UN 2008 Kabupaten Kupang terendah di antara 20 (dua puluh) Kabupaten di NTT yakni urutan ke 18 sedangkan tingkatan nasional NTT urutan ke 33 Propinsi di Indonesia.

Kualifikasi Guru SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang

Kondisi guru di SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten Kupang berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi guru dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Guru di SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten Kupang Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Guru Tahun 2009

No	Nama Sekolah	Status Guru		Kualifikasi					
		PNS	Honor	SMA/SMK	DIII	SPG	PGSD	PGSLP	S1
1	SD-SMP Negeri Satu Atap Tinis	4	6	6	-	2	-	-	2
2	SD-SMP Negeri Satu Atap Passi	1	11	2	6	1	-	-	3
3	SD-SMP Negeri Satu Atap Bonatama	2	11		1	1		1	3

4	SD-SMP Negeri Satu Atap Oemolo	5	9	7	1	4	-	1	1
5	SD-SMP Negeri Satu Atap Nekon	2	10	2	1		3		5

Sumber: SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang (5 sekolah) Data diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa 77,96% guru pada 5 SD-SMP Negeri Satu Atap belum berkualifikasi S-1/D-IV sesuai amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen. Sedangkan guru yang sudah berkualifikasi S-1/D-IV adalah 3 orang atau 14,03% yang seharusnya menurut UU Sisdiknas mempunyai kewenangan mengajar di SD - SMP Negeri satu Atap. Melihat kenyataan ini beban guru yang begitu berat sementara masih banyak guru belum berkualifikasi, hal ini akan mempengaruhi mutu pendidikan di Kabupaten Kupang Provinsi NTT.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam proses pembelajaran masih terdapat guru SD-SMP Negeri Satu Atap berkualifikasi SPG, PGSD, PGSLP yang mengajar di SMP dengan mata pelajaran yang sama seperti Matematika, Bahasa Indonesia, PKN dan mata pelajaran lain, dengan berasumsi bahwa mata pelajaran tersebut gampang atau mudah diajarkan. Asumsi ini digunakan oleh hampir seluruh SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang sehingga mengakibatkan adanya guru yang merangkap mata pelajaran. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas adalah pembelajaran yang disebut oleh Paulo, pembelajaran pasif dengan model pembelajaran deposit atau pembelajaran gaya Bank.

Pembelajaran pasif atau pembelajaran guru bank merupakan model pembelajaran dimana guru menerangkan, siswa mendengarkan, guru mendikte, siswa mencatat, guru bertanya siswa menjawab, dan seterusnya. Paulo menyebutnya pembelajaran model deposito guru sebagai depositan yang mendepositokan pengetahuan serta berbagai pengalamannya pada siswa. Siswa hanya menerima dan mencatat serta menyimpan semua yang disampaikan guru. Pendidikan pembelajaran model Bank menurut Ferire merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap siswa karena menghambat kreatifitas dan pengembangan potensi atau kompetensi peserta didik (Freire, 2000).

Model pembelajaran bank yang terjadi di SD-SMP Negeri Satu Atap, Kabupaten Kupang sangat mempengaruhi mutu pendidikan dalam kaitan dengan wajib belajar 9 tahun karena dalam pembelajaran tersebut, guru tidak membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) karena tidak ada waktu, guru mengajar dua sekolah (SD-SMP Negeri Satu Atap) mata pelajarannya juga SD dan SMP, sehingga kreatifitas guru tidak nampak. Guru SD-SMP Negeri Satu Atap yang tidak berkualifikasi S-1/D-IV juga akan mempengaruhi guru dalam proses pembelajaran karena kemampuan mengimplentasikan materi pembelajaran atau menstransfer ilmu kepada muridnya tidak sesuai ketentuan kriteria mengajar seorang guru yang berhasil dan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang tetap memperoleh ranking terbelakang. Kompetensi siswa dan guru tidak jelas akan melahirkan generasi yang jongkok yang wawasannya tidak bisa diharapkan.

Kompetensi Guru SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang

Kompetensi profesi guru rangkap mata pelajaran yang didata dari lima SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kompetensi Profesi Guru Rangkap Mata Pelajaran Yang Didata Dari lima SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang Tahun 2009

No	Nama Guru	SD-SMP Negeri Satu Atap	Pedagogik	Profesional	Rata-Rata	Kriteria
1	Ananias T.	Nekon	2,5	4,2	3,35	Cukup
2	Diana S.	Oemolo	2,5	3,8	3,15	Cukup
3	Daryes K.	Bonasama	3,5	3,4	3,45	Cukup
4	Erny	Oemolo	2,5	3,0	2,75	Kurang
5	Jemi K.	Nekon	2,7	3,8	3,25	Cukup
6	Marta P.	Oemolo	2,5	2,6	2,55	Kurang
7	Oktavia N.	Tinis	2,5	2,6	2,55	Kurang

8	Rolina A.	Nekon	3,5	3,4	3,45	Cukup
9	Serly Y. T.	Nekon	2,7	3,8	3,25	Cukup
10	Sardak	Oemolo	2,5	2,6	21,55	Kurang
11	Wasty	Oemolo	2,5	3,8	3,15	Cukup
12	Yosua P.	Oemolo	2,9	3,4	3,15	Cukup
13	Susana R.	Oemolo	2,5	3,4	2,95	Cukup
14	Merryana U.	Passi	2,5	3,4	2,95	Cukup
15	J. Mamo	Passi	2,7	3,4	3,05	Cukup
16	Fince F.	Passi	2,5	2,6	3,05	Kurang
	Rata – Rata		2,56	3,14	3,01	
	Kriteria		Kurang	Cukup	Kurang	

Sumber: SD-SMP Negeri Satu Atap Kabupaten Kupang (5 sekolah) Data diolah

PP No. 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi paedagogik dan kompetensi merupakan kemampuan mengelola proses pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap materi pertumbuhan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 2005).

Tabel 3 menunjukkan bahwa kompetensi paedagogik guru di lima SD-SMP Negeri Satu Atap setelah dianalisis memperlihatkan kategori “kurang” yang dinyatakan dalam angka rata-rata 2,55 sedangkan kompetensi profesional memperlihatkan kategori “cukup” yang dinyatakan dengan rata-rata 3,01. Melihat hasil atau nilai yang diperoleh guru kaitan dengan aspek penilaian berdasarkan dua kompetensi profesi guru ditemukan bahwa 75% guru SD-SMP Negeri Satu Atap, kurang memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik.

Respon Masyarakat Terhadap Kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap, di Kabupaten Kupang

Berdasarkan penelitian mengenai respon atau tanggapan tokoh masyarakat tentang kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang, ditemukan bahwa pada dasarnya masyarakat merasa senang atas upaya pemerintah pusat melalui Pemda Kabupaten Kupang yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Hal ini membawa dampak positif bagi anak-anak agar tidak perlu keluar daerah untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan sekaligus menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan mendukung renstra pemerintah Depdiknas yang dalam visi misinya mencapai angka dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat.

Keberadaan SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang di sisi lain juga masih memiliki banyak kekurangan seperti sarana prasarana, media pembelajaran, laboratorium dan perpustakaan yang tidak memadai sehingga akan menghambat proses pembelajaran yang berbasis praktek. Jumlah guru mata pelajaran yang belum memadai, kualifikasi latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, serta kompetensi guru yang tidak sesuai syarat mutu juga akan mempengaruhi presentase dan kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah.

Masyarakat berharap agar pemerintah pusat tidak lagi mengembangkan model pendidikan terpadu seperti SD-SMP Negeri Satu Atap yang sementara di kembangkan di Kabupaten Kupang tetapi pemerintah daerah dapat mengembangkan Unit Sekolah Baru (USB) dengan bekerja sama dengan pusat untuk mendapatkan bantuan dana. Proses pengangkatan guru juga hendaknya disesuaikan dengan kualifikasi dan syarat mutu yang mengacu pada UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen Tahun 2005, agar dapat memperbaiki kualitas lulusan yang dihasilkan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bentuk kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang merujuk pada program wajib belajar 9 tahun dikelompokkan menjadi empat yakni : 1) yang sudah dilaksanakan meliputi pengadaan guru PNS, guru kontrak dan guru bantu; 2) sedang dilaksanakan meliputi pengadaan guru PNS, guru honor pada setiap sekolah, peningkatan kualifikasi guru SD ke SI untuk mendapat tunjangan sertifikasi dengan biaya subsidi, dan pengadaan guru kontrak; 3) belum

dilaksanakan meliputi peningkatan kualifikasi guru berlatarbelakang SMA sedang mengajar di lapangan, Diploma 1, 2 dan 3, PGLTP, SPG, PGSD D2 untuk ke S1 pendidikan dari syarat mutu, memberikan subsidi lanjut kuliah kepada mereka yang disebut di atas untuk mempermudah kuliahnya sekaligus, meningkatkan kualifikasi guru S1 ke S2, dan memberikan diklat kompetensi bagi Guru SMP; dan 4) yang akan dilaksanakan. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi program- program tersebut dicanangkan, yaitu UU No. 20 tentang Sisdiknas, kebijakan daerah bidang peningkatan mutu pendidikan, dan dukungan besarnya dana dari APBD.

Program utama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang adalah pengadaan guru (PNS, guru bantu, dan kontrak). Keberhasilan program tersebut tergantung dari distribusi tenaga guru yang sesuai dengan kebutuhan serta adanya aturan yang jelas tentang perekrutan pengembangan sekolah termasuk juga mutasi guru. Permasalahan yang dihadapi letak geografis Kabupaten Kupang terdiri dari gunung dan barisan bukit serta perhubungan dan transportasi yang sulit, mengakibatkan tenaga guru yang baru angkat tidak mau ditempatkan pada tempat yang jauh dari keramaian atau daerah terpencil dan terpencar serta terisolir di Kabupaten Kupang, sehingga perkembangan di daerah ini terbelakang dibanding daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penelitian ditemukan juga bahwa, pengadaan guru PNS maupun non PNS, guru bantu, guru honor daerah lebih mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat dibanding dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Hal ini dikarenakan adanya hambatan yang sering dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dalam program meningkatkan kualifikasi dan kompetensi profesi guru yang meliputi hambatan dalam proses perencanaan seperti adanya intervensi kepentingan penguasa dalam proses penempatan guru dan pengangkatan PNS guru dan tenaga kontrak daerah dan kurang adanya koordinasi dengan instansi teknis, hambatan proses implementasi seperti keterbatasan dana dan SDM, lemahnya perencanaan, dan komitmen yang rendah, serta hambatan dalam proses evaluasi seperti keterbatasan SDM, tidak adanya dana, program dan instrumen evaluasi yang baik.

SIMPULAN

Keadaan guru di 5 SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang jika ditinjau dari segi kuantitas guru masih sangat terbatas, bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya sangat kurang 10 sampai 7 orang. Hal ini mengakibatkan guru-guru SD yang tidak sesuai syarat mutu untuk mengajar, direkrut untuk mengajar SMP Negeri Satu Atap. Masih banyak guru di 5 SD-SMP Negeri Satu Atap yang belum berkualifikasi D S-1/D-IV. Kualifikasi guru yang tidak sesuai dengan syarat mutu mengakibatkan kurangnya kompetensi profesi guru dalam proses pembelajaran dengan peserta didik. Hal ini akan menciptakan model pembelajaran bank dan turut mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan SD-SMP Negeri Satu Atap. Masyarakat setempat memiliki respon yang positif terhadap kehadiran SD-SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Kupang karena sangat mempermudah anak-anak dalam mendapatkan pelayanan pendidikan sekaligus menaikan APK di Kabupaten Kupang. Pemerintah perlu mengangkat guru PNS dan honor yang sesuai dengan syarat mutu mengajar, menyediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang memadai seperti laboratorium dan perpustakaan, memberikan kemudahan bagi guru yang belum berkualifikasi S-1/D-IV agar dapat melanjutkan pendidikannya. Guru juga perlu meningkatkan kompetensi profesi dengan berpartisipasi dalam seminar, MGMP Gugus dan MGMP Sekolah yang diadakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang. (2005). Profil Pendidikan Kabupaten Kupang 2005. Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- Freire, P. (2000). Pendidikan Kaum Tertindas. LP3ES.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 1 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005>
- UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 1 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 1 (2005).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>